Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan *E-Filing* di Kota Padang

Annissa Deffira^{*}, Rahmat Kurniawan

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia

^{*}Correspondence email: iwan.rahmat13@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada saat sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing*?. Berdasarkan hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan uji *paired t-test* dengan bantuan SPSS, pada 100 sampel yang diujimaka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji *paired t-test* yang menunjukkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan *e-filing* sebesar 41,86 yang lebih besar dari nilai rata-rata sebelum penerapan *e-filing* sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; *e-filing*

Abstract. This study aims to test whether there are significant differences in the compliance of private taxpayers at the time before and after the implementation of *e-filing*?. Based on the hypothesis analyzed using *paired t-test* with the help of SPSS, in 100 samples tested, it can be concluded that there are significant differences in the compliance of private taxpayers, especially in SPT reporting before and after the application of *e-filing*. This can be proven from the test results *paired t-test* that shows the value of sig. (2-tailed) of 0.000 which is smaller than 0.05, as well as the average value of personal taxpayer compliance after the application of *e-filing* is 41.86 which is greater than the average value before the application of *e-filing* of 29.31 with an average difference of 12.55.

Keywords: taxpayer compliance; *e-filing*

PENDAHULUAN

Pentingnya peranan pajak di zaman modern ini, hingga seorang (Franklin, 1907) pernah berkata “*in this world nothing is certain except death and taxes*”. Hal ini berarti tidak ada yang lebih pasti akan dihadapi manusia selain pajak dan kematian, karena di dunia ini tidak ada tempat yang tidak terjamah oleh aspek pajak tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain dibutuhkan kesadaran wajib pajak juga dibutuhkan partisipasi aktif dari pegawai pajak. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak. Target Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam (APBN, 2018), penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.424,00 Triliun. Dari target penerimaan pajak dalam (APBN, 2018) sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir (Kementerian Keuangan RI, 2018). Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23% (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik, . Setelah sukses dengan program e-SPT, kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*), melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP), (Pajak., 2005). Pada tanggal 16 Desember 2008 Direktorat Jenderal Pajak merevisi peraturan tersebut dengan dikeluarkannya peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008, (Direktorat Jendral Pajak). Peraturan tersebut beberapa kali mengalami pembaharuan diantaranya dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2013, ((*E-Filing*), 2008). kemudian Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-03/PJ/2015, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, dan terakhir Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, (Direktorat Jendral Pajak; (E-Filing), 2008).

Dengan dikeluarkannya surat keputusan Direktur Jenderal Pajak secara resmi dikeluarkannya produk *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id, (2020); Direktorat Jendral Pajak; DJP, 2020) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (www.online-pajak.com). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT nya di rumah atau kantor. Wajib pajak juga dapat melaporkan SPT nya 24 jam selama 7 hari. Artinya, wajib pajak dapat melaporkan SPT nya meskipun pada hari libur. Maka hal ini tentunya akan menghemat tenaga, waktu, maupun biaya. Selain itu dengan menggunakan *e-filing* juga dapat menghemat penggunaan kertas (Mutia, 2016.).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan *e-filing* tergantung dari kenyamanan dan kemudahan Wajib Pajak saat mengakses sistem informasi (*e-filing*) untuk menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material (substansi), dimana kepatuhan formal artinya melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan material (substansi) berarti SPT itu disampaikan dengan benar (Darussalam, 2011). Penggunaan sistem *e-filing* memanfaatkan jaringan internet, maka wajib pajak dituntut untuk dapat memahami dan mengoperasikan internet. Sementara masih ada kekhawatiran dari wajib pajak untuk menggunakan *e-filing* saat penyampaian SPT, mereka mengaku khawatir apabila jaringan internet mengalami error atau *down* sehingga data tidak terekam, hilang, dan justru tidak masuk di database Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengakui sempat terjadi kendala server pelaporan SPT tahunan, hal ini dikarenakan server tidak bisa mengakomodasi lonjakan pelapor yang mengakses bersama-sama. Hal ini akan menjadi catatan Kemenkeu mengingat pengisian SPT melalui *e-filing* menjadi cara yang mulai diminati. Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan akan mengatur ulang strategi agar angka masyarakat yang melapor pajak bisa terus naik. Evaluasi akan dilakukan secara internal dan dari segi perilaku wajib pajak (www.cnnindonesia.com), (CNN, 2020).

Sementara itu di Sumatera Barat pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu wajib pajak orang pribadi dan badan (www.republika.co.id:2018), (REPUBLIKA, 2020) dan menurut Sekretaris Kota (Sekko) Pariaman Indra Sakti menyebutkan bahwa hampir 90 persen (ASN) di Kota Pariaman masih kurang mengerti tentang proses dan penyampaian pajak tahunan melalui *e-filing* dan hanya 50% ASN Kota Pariaman yang melaporkan pajak tahunannya melalui *e-filing*. Hal ini disebabkan oleh tidak sepenuhnya Wajib Pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan dan *e-filing* itu sendiri (Ekspress, 2018). Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, sampai pada batas waktu pelaporan. Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Menurut Andreoni dalam (Hutagaol, 2007.) masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut.

Tinjauan Pustaka

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan memberikan motivasi bagi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2012). Kepatuhan juga merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut (Tahar, 2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley 1972 (Nungraheni, 2015). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan

mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Teori atribusi juga merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Menurut (Noviani, 2018) terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu: (1) Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku; (2) Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan; dan (3) Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi atau lingkungan. Maksud dari teori ini lebih memfokuskan pada perilaku terhadap individunya. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu misalnya perilaku berdasarkan faktor internal adalah seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan melaporkan SPT nya tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu.

Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. *E-SPT* dapat dilakukan melalui media elektronik. Yang dimaksud dengan media elektronik yaitu sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Sarana penyimpanan dapat digunakan bervariasi sehingga memberikan alternatif dalam melaporkan SPT dibanding yang sebelumnya. Untuk memindahkan data tersebut, wajib pajak dapat menggunakan disket, CD, ataupun *flash disk* sebagai medianya. Penyampaian SPT melalui media elektronik dilakukan dengan cara manual, yaitu disampaikan langsung ke tempat wajib pajak terdaftar atau disampaikan melalui kantor pos terdekat. Pelaporan pajak dengan *e-SPT* dapat juga dilakukan menggunakan *e-filing*. Metode pelaporan ini tentunya berbeda dengan metode penyampaian dalam bentuk media elektronik, melalui *e-filing*, penyampaian data elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem online yang *real time* melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi atau (*Application server provider*) ASP.

Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah sebagai berikut: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket; (2) Data perpajakan terorganisir dengan baik; Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis; Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; Kemudahan dalam membuat laporan pajak; Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer; dan Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 (DJP, 2017). Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dijelaskan pada pasal 2 bahwa :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaiannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.
3. SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh wajib pajak yang :
 - a. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik
 - d. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

- e. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan/atau
- f. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik
4. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang :
 - a. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar, dan/atau
 - b. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
5. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara :
 - a. Langsung;
 - b. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat
 - c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
6. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
 - a. Laman Direktorat Jenderal Pajak
 - b. Laman Penyalur SPT Elektronik
 - c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
 - d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan;
 - e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tentang pelampiran keuangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT elektronik sesuai ketentuan Perundang-undangan Perpajakan pasal 3 ayat (1) dengan cara :

- a. Menyampaikan dalam format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*, dalam hal SPT Elektronik disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
- b. Mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia.

Konsep Kepatuhan Pajak

Menurut (Pratama, 2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Konsep E-Filing System

Pengertian E-Filing System

Menurut (DJP, 2015) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang dimaksud dengan *e-filing* atau lapor pajak online adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). *E-filing* atau lapor pajak online ini dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan adanya e-filing dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga akan lebih efektif dan efisien. Selain dapat menghemat dari segi biaya, penggunaan e-filing membantu dalam pengurangan penggunaan kertas, perangko dan data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan internet. *E-filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak secara online *realtime*. *Online* berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* artinya bahwa konfirmasi dari DJP dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Dasar Hukum E-Filing

Dalam menggunakan sistem *e-filing* ini wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan, dan keasliannya. Terdapat beberapa dasar hukum mengenai *e-filing*, diantaranya (DJP, 2016); (DJP, 2017); (DJP, 2018); (DJP, 2019) adalah :

- a) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- d) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh (Suherman, 2015), menyimpulkan bahwa program *e-Filing* belum cukup maksimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. Sementara (Avianto, 2016) menyimpulkan bahwa *e-filing* dapat menumbuhkan suatu kepatuhan sukarela bagi wajib pajak melalui program pelayanannya yang baik dan prosedur yang sederhana serta memudahkan wajib pajak, wajib pajak dapat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaela, 2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Begitupun dengan hasil yang diperoleh oleh (Suprayogo, 2018), (Dewi, 2010) menyimpulkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapatkan dari (Ni Komang Cahyani, .2019) dan (Ismail, 2018) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan dengan diberlakukannya *e-filing* dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak seperti adanya efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta keamanan, yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun disisi lain *e-filing* juga memiliki berbagai kekurangan sehingga membuat wajib pajak belum maksimal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H_0 : tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*.

H_a : terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sungarimbun, 1995). Penelitian eksplanatory menjelaskan suatu fenomena sosial khusus tentang mengapa (*why*) dan *bagaimana* (*how*) sesuatu terjadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan (*purposive sampling*) yang menurut (Sugiyono, 2016) merupakan tipe pemilihan sampel yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini (Sugiyono, 2016) menggunakan kriteria yang ditentukan memenuhi kebutuhan penelitian, kriterianya adalah : (1) Sudah memiliki NPWP; (2) Wajib pajak orang pribadi yang sudah menggunakan *e-filing system*; dan (3) Berdomisili di Kota Padang. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin. Sehingga didapatkan jumlah sampel 99,925 dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi sebagai responden dalam penelitian ini.

Metode untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan *paired sample t test* (Sugiyono, 2016). Tujuan analisis ini adalah untuk menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang berbeda atau tidak. Sampel berpasangan (*paired sample*) adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Menurut (Widiyanto, 2013) *paired sample t test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji *paired sample t test* adalah :

1. Jika probabilitas (Asymp sig) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika probabilitas (Asymp sig) > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah data dikumpulkan dan didapat 100 responden maka proses pengolahan data dapat dilakukan. Proses pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Demografi responden pada penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lamanya menggunakan *e-filing*. Setelah dilakukan tabulasi data dan sesuai dengan hasil yang diperoleh maka dapat dikelompokkan demografi responden berdasarkan jenis kelamin wanita 69 orang dan laki-laki 31 orang. Sampel dalam penelitian ini sebagian besar memiliki rentang usia 41-50 tahun yaitu berjumlah 38 orang dengan persentase 38%. Selanjutnya, pada rentang usia diatas 50 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 22%, rentang usia 21-30 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 21%, dan terakhir pada rentang usia 31-40 tahun berjumlah 19 orang dengan persentase 19%. Responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak berasal dari pasca sarjana berjumlah 61 orang dengan persentase 61%, selanjutnya sarjana berjumlah 27 orang dengan persentase 27%, kemudian yang berasal dari diploma dan SLTA memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 6 orang dengan tingkat persentase masing-masingnya 6%. Diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 33 orang dengan persentase 33%. Selanjutnya responden yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 31 orang dengan persentase 31%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, dan terakhir yang memiliki tingkat persentase terbesar yaitu sebesar 34% berjumlah 34 orang memilih jenis pekerjaan lainnya. Pada karakteristik lamanya responden telah menggunakan *e-filing system*, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar waktu penggunaan *e-filing system* oleh responden adalah lebih dari satu tahun yakni berjumlah 82 orang dengan tingkat persentase 82%. Selanjutnya untuk jangka waktu satu tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 18%.

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang data yang diteliti. Dalam uji statistik deskriptif terdapat nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maksimum*), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*std. deviation*). Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik deskriptif. Nilai terendah sebelum *e-filing* adalah sebesar 23, nilai tertinggi 38, dan nilai rata-rata sebesar 29,31 dengan standar deviasi sebesar 3,174, yang artinya terdapat penyimpangan sebesar 3,174 dari nilai rata-rata sebesar 29,31. Sedangkan setelah *e-filing* nilai terendah sebesar 36, nilai tertinggi nya 45, dan nilai rata-rata sebesar 41,86 dengan standar deviasi 2,985, yang artinya terdapat penyimpangan sebesar 2,985 dari nilai rata-rata yang berjumlah 41,86.

Persepsi WP Orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing System

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan distribusi jawaban untuk gambaran kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*. Mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *e-filing system*, dapat diketahui bahwa jawaban dari 100 responden sebagian besar mengarah kepada setuju dengan persentase sebesar 38,875%. Selanjutnya pada jawaban sangat setuju dengan persentase 31,50%, diikuti dengan jawaban tidak setuju dengan persentase sebesar 23,25%, kemudian dengan jawaban sangat tidak setuju dengan persentase 6,125%, dan terakhir pada jawaban cukup setuju dengan persentase sebesar 0,25%. Dapat disimpulkan bahwa secara umum responden cenderung setuju dengan indikator kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *e-filing system*, dimana sebelum diterapkannya *e-filing system*, wajib pajak merasakan berbagai kesulitan dalam hal pelaporan SPT manual.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan hasil-hasil penelitian terkait dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada BAB I yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing* di Kota Padang. Penerapan *e-filing* memberikan berbagai macam kemudahan kepada wajib pajak, diantaranya memudahkan dalam proses penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Karena *e-filing* dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh wajib pajak dengan hanya menggunakan akses internet, sehingga wajib pajak tidak perlu untuk mengantri dalam melaporkan SPT baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dimana H_a diterima dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji *paired t-test* yang menunjukkan nilai *sig.* (2-tailed) sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan *e-filing* mengenai *paired sample statistics* lebih besar dari nilai rata-rata sebelum penerapan *e-filing*. Dimana nilai rata-rata sesudah penerapan *e-filing* sebesar 41,86 dan sebelum penerapan *e-filing* sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55. Artinya, dengan diterapkannya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Padang.

Hal ini didukung dengan adanya Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku

seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggraeni, 2013). Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut (Zain, 2004); (Zain, 2007), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. (Hardiningsih, 2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak.

Distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *e-filing*, persentase responden yang terbesar berada pada jawaban setuju sebesar 38,875. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka mengalami berbagai kesulitan selama dalam proses pelaporan SPT manual, seperti yang telah diuraikan pada Tabel 3.1 mengenai indikator kuesioner penelitian. Hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan sekitar 65,44% responden menyatakan sangat setuju, seperti yang terlihat pada Tabel 4.9 tentang distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan *e-filing*. Hal ini menjelaskan bahwa responden memberikan respon positif terhadap penerapan *e-filing* di Kota Padang. Responden berpendapat bahwa *e-filing* sangat bermanfaat dan memberikan banyak kemudahan dalam menyampaikan SPT-nya. Mengacu pada Teori Atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat keputusan perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang merasa mendapat kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui *e-filing* akan memenuhi kewajibannya tersebut tanpa adanya paksaan. Meskipun demikian, capaian penggunaan *e-filing* belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap penggunaan *e-filing* sehingga wajib pajak yang bukan berasal dari lingkungan akuntansi merasa kesulitan dalam proses pengisian *e-filing* ini.

Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Agustiningsih, 2016) berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Selain itu penelitian dari (Suprayogo, 2018) juga mendukung penelitian ini, dimana hasil penelitian yang mereka lakukan menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, yakni terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau semakin tinggi penerapan sistem *e-filing*, maka semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh terhadap perpajakan. Selain penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaela, 2017) juga memberikan hasil yang serupa yakni penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Penerapan sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suherman, 2015) dimana hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak orang pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT

Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui *efiling* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-filing* yang menjadi kendala bagi wajib pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Abdurrohman, 2015), yang menyimpulkan bahwa implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena *e-filing* belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berusia lanjut atau orang tua cenderung enggan melakukan *e-filing*, mereka lebih suka melaporkan SPT secara manual atau datang langsung ke kantor pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang IT. Selain faktor umur, faktor geografis Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar merupakan wilayah pedesaan tentu sangat berpengaruh besar terhadap pengguna *e-filing*, kurangnya fasilitas *e-government* yang berupa sarana dan prasarana untuk akses internet menjadikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro lebih memilih untuk melaporkan SPT nya secara manual. Pemberlakuan *e-filing* ini merupakan perwujudan dari reformasi administrasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, sehingga efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dapat dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan uji *paired t-test* dengan bantuan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan *e-filing*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji *paired t-test* yang menunjukkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan *e-filing* sebesar 41,86 yang lebih besar dari nilai rata-rata sebelum penerapan *e-filing* sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, S. T. D., dan Muhammad Shobaruddin. 2015. " Implementasi Program E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. Vol. 3, No. No. 5x, hlm: No. 5, Hal. 807-811.
- Agustiniingsih, W. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. ". *JURNAL NOMINAL*, Vol. VOLUME V No. NOMOR 2 / TAHUN 2016, hlm.
- Anggraeni, D. 2013. "'Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Universitas Diponegoro.". *Unpublished Paper*. Universitas Diponegoro.,
- APBN. 2018. "10,5 Juta SPT Masuk, 80 Persen Melalui E-Filing.". [diakses pada 03 januari 2019].
- Avianto, G. D. S. M. R., dan Bayu Kaniskha. 2016. "Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. Vol. 9 No. No. 1 2016., hlm.
- CNN, I. 2020. "kemenkeu bakal evaluasi e-filing spt.". [diakses pada 24 agustus 2020].
- Darussalam, D. 2011. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Laporkan SPT Meningkat 53,2%.". [diakses pada Kamis,15 Oktober. 2015.].
- Dewi, S. J. 2010. "'Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan KPP Pratama Malang Selatan)". ". *Unpublished Paper*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.,
- Direktorat Jendral Pajak, h. w. p. g. i. e.-f., Vol., No., hlm.
- DJP. 2015. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI.
- . 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI.
- . 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. 2017. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia., edited by D. J. Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- . 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. 2018. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI: jakarta.

- . 2019. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI.
- . 2020. "E-filing pajak". [diakses pada].
- Ekspress, P. 2018. "tidak sepenuhnya Wajib Pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan dan e-filing itu sendiri (Padang Ekspress:2018)". [diakses pada 2018].
- Franklin, B. 1907. *The Writings of Benjamin Franklin*. London: Macmillan Publishers: Albert Henry Smyth.
- Hardiningsih. 2011. "faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.". *dinamika keuangan*, Vol., No., hlm: 126-142.
- Hutagaol, J. 2007. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. ". *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. Vol.6., No. No.2., hlm.
- Ismail, J. G., dan Fitriningsih Amalo. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang)". *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol. Vol. 5., No. N0. 3, SEPTEMBER 2018 Hal. 11 s/d 22). hlm.
- Judge, R. d. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, L. D. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- . 2019. *laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak*.
- Mutia, Y. D. 2016. " Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UBH.". *Unpublished Paper*.
- Ni Komang Cahyani, P. d. N. N. .2019. " Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ". *E-JA: E JURNAL AKUNTANSI*, Vol. VOL 28 No. NO 3 SEPTEMBER 2019 . hlm.
- Noviani, B. 2018. ""Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi". ". *Unpublished Paper*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.,
- Nungraheni, A. D. d. A. P. 2015. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). ". *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Vol. Volume 4, , No. Nomor 3., hlm: Halaman 1-14.
- Nurlaela, L. 2017. "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Vol. 02; No. 02; Tahun 2017 Halaman 001-008.". *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol. 02, No. 02, hlm: 001-008.
- Pajak., D. J. 2005. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang "Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik"*, Jakarta.
- . 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang " Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik"*, .
- Pratama, M. R. 2012. " Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.". *Unpublished Paper*. Universitas Bina Nusantara, jakarta,
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta.: Graha Ilmu.,
- REPUBLIKA. 2020. "WAJIB PAJAK MASIH MINIM DALAM MELAPORKAN SPT di SUMBAR". [diakses pada 15 APRIL 2020].
- Saraswati, A. K. 2012. ""Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)".". *Unpublished Paper*. Skripsi. Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.,
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suherman, M. M. A., dan Rina Marlina 2015. "Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. ". *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. Vol. 15 No. No. 1 april 2015, hlm.
- Sungarimbun, M. d. E. S. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Suprayogo, d. M. H. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.". *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. Vol. 11 No. No. 2 Agustus 2018., hlm.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. . 2014. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. Vo. 15, , No. No. 1., hlm.
- Widiyanto. 2013. *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Alex Mediaa Komputindo.: PT Alex Mediaa Komputindo.
- Zain, M. 2004. *Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat*.: Salemba Empat.